

POTENSI WISATA KAWASAN PESISIR DESA KUALA TRANG KABUPATEN NAGAN RAYA

Amirul Haq¹, Suldarajat², Abzalul Fikri³, Ragil Hasyimi⁴, *Nafisah Eka Puteri⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar,
Aceh Barat

amirulhaq968@gmail.com¹, suldarajad@gmail.com², abzalulfikri3@gmail.com³,
ragilhasyimi@gmail.com⁴, [*nafisahekaputeri@utu.ac.id](mailto:nafisahekaputeri@utu.ac.id)⁵

Abstract

Kuala Trang in Nagan Raya Regency has significant coastal natural tourism potential, but it has not been optimally utilized for community welfare. This study aims to analyze local resource-based community empowerment strategies to develop a sustainable tourism village. The research method uses qualitative and quantitative approaches to examine supply (through observation and interviews) and demand (through questionnaires of potential tourists). The results show that although the community is very supportive (86%) and the natural scenery is very potential (score 3.86), this destination has critical weaknesses in the institutional aspects (score 1.07), amenities, active attractions, and promotion. Therefore, an integrative empowerment model is formulated that synergizes institutional strengthening, community capacity development, the creation of experience-based tourism packages, and digital marketing. The strategic implications emphasize multi-stakeholder collaboration, where the village and district governments act as facilitators and regulators, while the community acts as the main organized actor to create sustainable and equitable tourism.

Keywords: *community-based tourism, tourism system, tourism village*

1. PENDAHULUAN

Desa wisata merujuk kepada suatu kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus dan daya tarik yang unik, baik yang bersumber dari keasrian lingkungan alam maupun kekayaan sosial-budaya masyarakatnya, yang kemudian dikelola dan disajikan secara menarik melalui pengembangan prasarana penunjang pariwisata dalam tata lingkungan yang serasi serta pengelolaan yang terencana dan profesional (Sudibya, 2018). Potensi desa wisata telah menjadi sumber ketertarikan baru dalam peta pembangunan ekonomi regional Indonesia, yang bertumpu pada keunikan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan strategis nasional pun mengarah pada penguatan desa melalui berbagai skema dana dan program inisiatif. Namun, tantangan utama yang seringkali muncul adalah pendekatan pengembangan yang masih bersifat top-down dan terstandarisasi, sehingga kerap mengabaikan kekhasan dan kapasitas sumber daya lokal yang dimiliki oleh setiap daerah. Akibatnya, banyak program pengembangan desa wisata yang tidak berkelanjutan dan gagal menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Kuala Trang merupakan satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Kuala Pesisir dan berlokasi cukup jauh dari pusat ibukota kecamatan (7 km) dan ibukota kabupaten (20 km). Secara

geografis, desa ini berada di wilayah pesisir barat yang memiliki bentang alam berupa kawasan pantai dan lahan pertanian. Desa Kuala Trang di Kabupaten Nagan Raya merupakan contoh wilayah yang memiliki sumber daya lokal yang melimpah, mulai dari keadaan pesisir yang masih asri, hingga kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Namun, potensi yang besar ini belum dimanfaatkan secara optimal dan terkelola secara strategis untuk kesejahteraan kolektif. Studi-studi terdahulu mengenai desa wisata di Nagan Raya umumnya masih membahas aspek potensi secara umum atau strategi pemasaran, sehingga belum menyentuh analisis mendalam mengenai mekanisme pemberdayaan yang berkelanjutan (Al-Amin & Tjoetra, 2022). Di samping itu, tantangan utama yang seringkali muncul adalah pendekatan pengembangan yang masih bersifat top-down dan terstandarisasi, sehingga kerap mengabaikan struktur sosial, kearifan lokal, dan dinamika kekuasaan yang unik di setiap komunitas. Akibatnya, banyak program pengembangan desa wisata yang tidak hanya gagal menciptakan dampak ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu konflik horisontal akibat distribusi manfaat yang tidak merata dan mengikis modal sosial yang telah terbangun.

Berdasarkan celah pengetahuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal untuk mengoptimalkan potensi Desa Kuala Trang sebagai desa wisata yang berkelanjutan. Analisis turut dilakukan dengan menggali interaksi antara sediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang menentukan keinginan dan kebutuhan wisatawan seperti yang dilakukan oleh Tyas & Damayanti (2018). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menyinergikan konsep *community-based tourism* (CBT) dengan prinsip keberlanjutan untuk kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta kontribusi akademik dalam literatur pariwisata berkelanjutan dan pembangunan pedesaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu sumber daya kepariwisataan yang berbasis pada potensi keunikan dan daya tarik desa, yang kemudian dapat diberdayakan menjadi suatu produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan (Sudibya, 2018). Berbeda dengan destinasi wisata konvensional, konsep inti dari desa wisata adalah keaslian kehidupan pedesaan, dimana wisatawan dapat mengalami secara langsung budaya, kearifan lokal, dan kehidupan sehari-hari masyarakat (Tyas and Damayanti, 2018). Karakteristik desa wisata meliputi kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat (*community-based*), menawarkan pengalaman wisata yang unik dan autentik berbasis pada sumber daya lokal, baik alam, budaya, maupun kuliner, serta skala usaha yang kecil dan tersebar sehingga menciptakan interaksi yang personal antara wisatawan dan warga. Prinsip-prinsip pengelolaannya harus berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkesinambungan oleh komunitas lokal (Sudibya, 2018). Dengan demikian, desa wisata bukan sekadar lokasi, tetapi merupakan sebuah sistem sosial-ekonomi yang memposisikan masyarakat sebagai subjek utama.

Pengembangan desa wisata yang bertanggung jawab harus berlandaskan pada paradigma pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata sekarang sekaligus melindungi dan meningkatkan peluang

untuk masa depan (Higgins-Desbiolles, 2018). Paradigma ini berdiri pada tiga pilar utama yang saling terkait. Pertama, aspek ekologi, menekankan pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, meminimalkan polusi dan limbah, serta menjaga keanekaragaman hayati. Kedua, aspek ekonomi, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang stabil bagi masyarakat lokal, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memastikan bahwa pendapatan dari wisata didistribusikan secara adil. Ketiga, aspek sosial-budaya, menghormati kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya, dan memperkuat identitas komunitas, sekaligus meminimalkan dampak negatif seperti komersialisasi budaya atau konflik sosial. Dengan demikian, desa wisata bukan sekadar lokasi, tetapi merupakan sebuah sistem sosial-ekonomi yang memposisikan masyarakat sebagai subjek utama, di mana relasi kuasa, nilai-nilai kolektivitas, dan norma-norma adat turut menentukan keberhasilannya.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Desa Wisata di Indonesia

Indonesia, dengan ribuan desa yang kaya akan potensi alam dan budaya, memiliki peluang besar dalam pengembangan desa wisata. Peluang ini didorong oleh kebijakan nasional yang memprioritaskan pengembangan destinasi berbasis komunitas, tren wisatawan global yang menginginkan pengalaman yang autentik, bermakna, dan berkelanjutan (*transformative travel*), dan potensi untuk mengurangi urbanisasi dan kemiskinan dengan menciptakan ekonomi baru di pedesaan. Namun, tantangan yang dihadapi pun kompleks (Budilaksono, et al, 2024). Di tingkat internal, tantangan utama meliputi kapasitas SDM yang terbatas dalam pengelolaan dan pemasaran, lemahnya kelembagaan dan tata kelola organisasi, serta keterbatasan modal dan akses permodalan. Secara eksternal, desa wisata menghadapi tantangan seperti tekanan globalisasi yang dapat mengikis nilai keaslian, kompetisi yang semakin ketat, dan ketidaksiapan infrastruktur dasar seperti akses transportasi dan jaringan internet. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang melalui pendekatan yang kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Syah, 2017).

2.3. Model *Community-Based Tourism* (CBT)

CBT merupakan model pengembangan desa wisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Menurut Zielinski et al. (2021), model ini dibangun atas prinsip fundamental berupa kepemilikan lokal, di mana masyarakat memiliki dan mengontrol sumber daya wisata; partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata; serta pembagian manfaat yang adil secara ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini, tata kelola kelembagaan yang efektif menjadi kunci penentu keberhasilan. Kelembagaan CBT yang representatif, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau koperasi, berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan, mengelola dana, dan menjamin transparansi pengambilan keputusan. Aspek kelembagaan yang kuat ini kemudian mendorong keberlanjutan ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. CBT menciptakan pasar bagi produk dan jasa masyarakat, mulai dari homestay, kuliner khas, kerajinan tangan, hingga jasa pemanduan, sehingga nilai ekonomi pariwisata dapat berputar dan memperkuat perekonomian desa secara keseluruhan. Dengan demikian, integrasi antara prinsip partisipatif,

tata kelola yang baik, dan penguatan UMKM menjadi pilar utama dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat lokal.

Keberhasilan CBT tidak hanya ditentukan oleh kelembagaan formal, tetapi juga oleh faktor-faktor sosiologis yang mendasarinya. Modal sosial, yang tercermin dari tingkat kepercayaan (trust), norma timbal balik, dan jejaring sosial (*social networks*) antarwarga, merupakan fondasi invisible yang memperkuat kerja sama dalam pengelolaan wisata. Selain itu, struktur sosial yang hierarkis dapat mempengaruhi partisipasi. Peran tokoh masyarakat (pemimpin opini) dan stratifikasi berdasarkan ekonomi, gender, atau usia seringkali menjadi penentu siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersingkirkan dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, analisis sosiologis terhadap kepemilikan, akses, dan kontrol atas sumber daya wisata menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang dikaji. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menganalisis aspek sediaan (*supply*), yang mencakup karakteristik masyarakat dan kebijakan pengembangan pariwisata. Pendekatan dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, observasi lapangan serta wawancara.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengkaji aspek permintaan (*demand*) wisata. Partisipasi dan kapasitas masyarakat Desa Kuala Trang sebagai responden terhadap pengembangan pariwisata di desa turut dinilai melalui kuesioner. Penilaian persepsi terhadap aspek sediaan Desa Kuala Trang dilakukan melalui penilaian responden berupa wisatawan potensial sebanyak 72 orang yang menilai 6 aspek elemen berdasar Tabel 3.1 yang diadaptasi dari Tyas & Damayanti (2018). Penilaian atas aspek yang dinilai kemudian diklasifikasikan berdasar total skor (Tabel 3.2).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan yang kredibel, khususnya perangkat desa. Data sekunder bersumber dari dokumen dan artikel terkait pengembangan pariwisata.

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Persepsi Aspek Sediaan

Elemen	Variabel	Skor	Kriteria Tiap Skor
Daya Tarik Wisatawan	Lanskap Fisik/ Pemandangan	1	Tidak memiliki pemandangan alam yang sangat menarik
		2	Memiliki pemandangan alam yang kurang menarik
		3	Memiliki pemandangan alam yang cukup menarik
		4	Memiliki pemandangan alam yang sangat menarik
	Atraksi/ Aktivitas Wisata	1	Tidak memiliki aktivitas wisata
		2	Aktivitas wisata tidak menarik dan monoton

		3	Cukup menarik dan memiliki pilihan aktivitas wisata
		4	Sangat menarik, dan berbeda dengan destinasi wisata lain
		1	Jalan sangat rusak dan sulit dilewati
		2	Kondisi jalan kurang baik, berlubang, namun masih mudah dilewati
Aksesibilitas	Kondisi jalan menuju desa	3	Kondisi jalan sempit, namun cukup baik dan mudah dilewati
		4	Kondisi jalan sangat baik dan lebar
		1	Tidak tersedia fasilitas rumah makan
		2	Tersedia hanya 1-2 rumah makan
Amenitas	Rumah makan	3	Tersedia banyak rumah makan namun tidak terawat
		4	Memiliki banyak pilihan rumah makan dan terawat dengan baik
	Tempat parkir	1	Belum tersedia tempat parkir
		2	Tersedia parkir namun sempit dan susah parkir
		3	Tersedia parkir luas dan mudah parkir
		4	Tersedia parkir luas dan mudah parkir, pelayanan baik
Promosi	Media promosi	1	Tidak tersedia promosi wisata baik di media cetak (brosur, pamflet/leaflet) atau internet
		2	Tersedia promosi wisata baik di media cetak (brosur, pamflet/leaflet) atau internet namun kurang menarik
		3	Tersedia promosi wisata baik di media cetak (brosur, pamflet/leaflet) atau internet yang sudah cukup menarik
		4	Tersedia promosi wisata baik di media cetak (brosur, pamflet/leaflet) atau internet yang sangat menarik
Informasi	Pusat informasi wisata	1	Tidak tersedia pusat informasi wisata
		2	Tersedia pusat informasi wisata namun aktif pada waktu tertentu
		3	Tersedia pusat informasi wisata dan aktif melayani wisatawan
		4	Tersedia pusat informasi wisata, aktif melayani wisatawan dan pelayanan baik
Kelembagaan	Organisasi pengelola	1	Tidak tersedia organisasi pengelola wisata
		2	Tersedia organisasi pengelola wisata namun aktif pada waktu tertentu
		3	Tersedia organisasi wisata dan aktif melayani wisatawan

	Keramahan masyarakat	4	Tersedia organisasi wisata dan aktif melayani wisatawan dan pelayanan baik
		1	Bersikap sangat tidak ramah
		2	Bersikap kurang ramah
		3	Bersikap ramah dan bersedia membantu
		4	Bersikap sangat ramah dan bersedia membantu

Tabel 3.2 Klasifikasi Total Skor

Elemen	Total Skor	Keterangan Penilaian
Daya tarik wisata	1 - 1.75	Sangat tidak potensial
	1.76 - 2.5	Kurang potensial
	2.51 - 3.25	Potensial
	3.26 - 4	Sangat potensial
Aksesibilitas	1 - 1.75	Sangat sulit dicapai
	1.76 - 2.5	Sulit dicapai
	2.51 - 3.25	Mudah dicapai
	3.26 - 4	Sangat mudah dicapai
Amenitas	1 - 1.75	Sangat tidak terpenuhi
	1.76 - 2.5	Kurang terpenuhi
	2.51 - 3.25	Terpenuhi
	3.26 - 4	Sangat terpenuhi
Promosi, Informasi, Kelembagaan	1 - 1.75	Sangat tidak mendukung
	1.76 - 2.5	Kurang mendukung
	2.51 - 3.25	Cukup mendukung
	3.26 - 4	Sangat mendukung

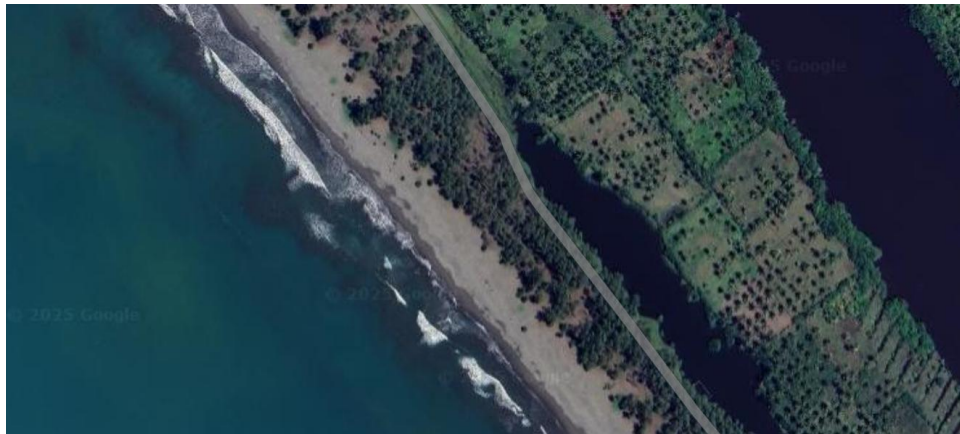
4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Desa Kuala Trang dan Aspek Sediaan

Desa Kuala Trang terletak di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Dari segi geografis, desa ini merupakan wilayah pesisir barat dengan pemandangan pantai dan area pertanian (Gambar 4.1). Batas-batas wilayah desa ini adalah Desa Padang Panyang di utara, Desa Kubang Gajah di barat, Samudera Hindia di selatan, dan Desa Cot Rambong di timur. Sebagai salah satu dari 16 desa di kecamatannya, Kuala Trang berjarak cukup jauh dari pusat pemerintahan kecamatan (7 km) dan kabupaten (20 km). Topografi kawasan ini didominasi daratan, dengan sebagian kecil berupa lembah, daerah aliran sungai, dan lereng. Iklimnya stabil sepanjang tahun dengan fluktuasi suhu dan kelembapan yang tidak ekstrem. Suhu rata-ratanya sekitar 26,2°C, dengan durasi penyinaran matahari rata-rata 5,2 jam per hari.

Sebagai desa pesisir dengan garis pantai sepanjang 5,2 km, Kuala Trang memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi wisata alam seperti pantai dan kolam yang indah dan alami (Gambar 4.2). Luas Desa Kuala Trang adalah 5,89 km² dengan kepadatan penduduk 112 jiwa per km². Berdasarkan data BPS (2024), jumlah penduduknya sebanyak 659 jiwa, yang terdiri

dari 337 laki-laki dan 322 perempuan. Penduduk tersebut tinggal di tiga dusun dan tercatat dalam 767 kepala keluarga. Profil mata pencaharian mayoritas penduduk, berdasarkan survei, adalah sebagai petani. Kondisi ini menyebabkan struktur perekonomian desa didominasi oleh kelompok menengah ke bawah. Komoditas andalan pertaniannya adalah kelapa sawit, kelapa, dan singkong. Kelapa sawit umumnya dijual ke pabrik pengolahan setempat, sementara singkong dan kelapa hanya diolah secara tradisional menjadi produk seperti tape dan kelapa gongseng (*u neulheu*), atau dijual langsung dalam bentuk mentah. Akibatnya, nilai ekonomi yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini masih tergolong rendah. Struktur mata pencaharian yang didominasi petani dengan ekonomi menengah ke bawah ini menciptakan kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Di satu sisi, kondisi ini membuat masyarakat sangat terbuka terhadap alternatif ekonomi baru seperti pariwisata. Namun, di sisi lain, keterbatasan modal finansial dan kapasitas manajerial dapat menjadi penghambat utama partisipasi mereka yang efektif, berpotensi menyebabkan hanya yang memiliki modal lebih yang dapat memanfaatkan peluang ini, sehingga memperlebar kesenjangan sosial.



Gambar 4.1 : Tangkapan Layar Topografi Desa Kuala Trang (Google Maps)

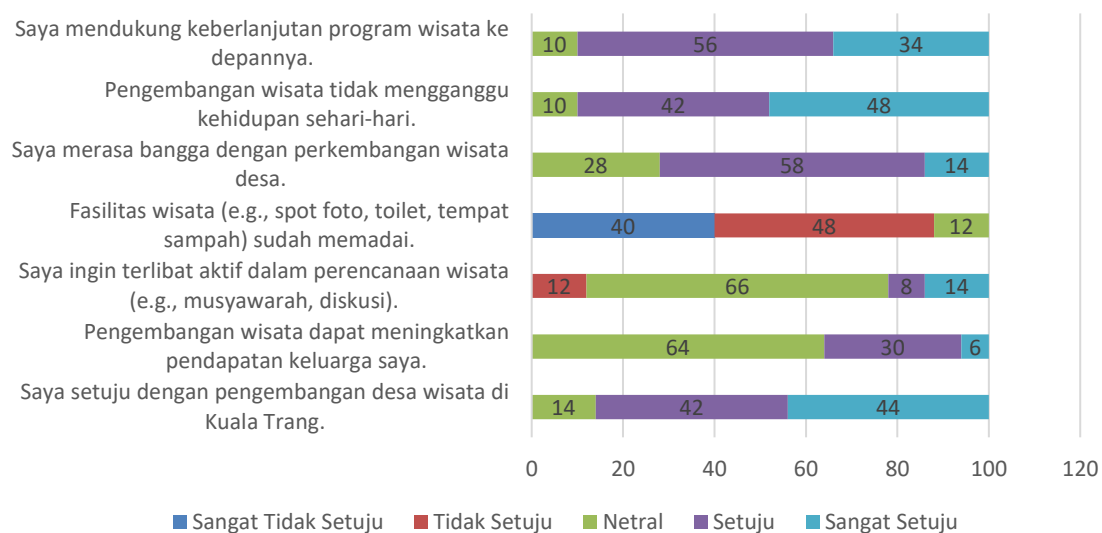


Gambar 4.2 : Potensi Desa Kuala Trang

Tidak ada data spesifik yang menjelaskan kebijakan terkait pengembangan pariwisata Desa Kuala Trang. Namun demikian, berdasar hasil wawancara dengan pemerintah desa, diketahui bahwa Desa Kuala Trang telah membaca potensi wisata yang ada tetapi belum mendapatkan dukungan dana dan pendampingan yang cukup untuk pengelolaan desa wisata.

4.2 Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan terhadap 50 responden di Desa Kuala Trang, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan yang sangat kuat dari masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, dengan tingkat persetujuan yang tinggi pada berbagai aspek (Gambar 4.3). Secara khusus, hasil menunjukkan bahwa 42% (Setuju) dan 44% (Sangat Setuju) responden menyetujui pengembangan desa wisata di Kuala Trang, yang menjadi indikator utama penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan wisata menunjukkan bahwa 12% responden tidak setuju untuk terlibat aktif dalam musyawarah dan diskusi dengan alasan pekerjaan maupun kondisi. Meskipun demikian, seluruh responden tetap menyetujui pengembangan desa wisata. Keyakinan akan dampak ekonomi pariwisata juga cukup optimis, tidak ada responden yang menyatakan Tidak Setuju ataupun Sangat Tidak Setuju bahwa pengembangan wisata dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Ketidakterlibatan ini mungkin bukan sekadar soal waktu, tetapi dapat merefleksikan faktor eksklusi sosial, seperti perasaan tidak memiliki kapasitas (*feeling of incompetence*), ketidakpercayaan terhadap proses musyawarah yang dianggap sudah diatur elite tertentu, atau adanya konflik laten antar kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang menjangkau kelompok ini sangat diperlukan.



Gambar 4.3 : Tingkat Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat terhadap Pariwisata Kuala Trang (%)

Dari sisi infrastruktur, sebagian besar responden (40% Sangat Tidak Setuju, 48% Tidak Setuju) menilai bahwa fasilitas wisata seperti spot foto, toilet, dan tempat sampah sudah memadai. Selain itu, 72% responden merasa bangga dan sangat bangga dengan perkembangan wisata desa, sementara selebihnya menyatakan Netral. Yang juga penting, 90% responden menyatakan bahwa pengembangan wisata tidak mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata berjalan harmonis dengan rutinitas lokal. Temuan ini merefleksikan lingkungan sosial yang sangat kondusif untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

(CBT), di mana masyarakat tidak hanya mendukung tetapi juga siap berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

4.3 Persepsi Wisatawan

Responden sebagai wisatawan potensial menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap kawasan pantai dan kolam bebek Desa Kuala Trang (Tabel 4.2). Sebanyak 61,54% responden menyatakan bahwa kawasan pantai dan kolam bebek Desa Kuala Trang menarik dan selebihnya (38,46%) menyatakan bahwa kawasan tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa kawasan tersebut tidak menarik untuk dikunjungi.

Tabel 4.2 : Skor Persepsi Wisatawan Potensial

Elemen	Variabel	Skor	Kriteria
Daya Tarik	Lanskap fisik/pemandangan	3.86	Sangat potensial
	Atraksi/aktivitas fisik	1.86	Kurang potensial
Aksesibilitas	Kondisi jalan	3.21	Mudah dicapai
Amenitas	Rumah makan	1.16	Sangat tidak terpenuhi
	Tempat parkir	2.26	Kurang terpenuhi
Promosi	Media promosi	1	Sangat tidak mendukung
Informasi	Pusat informasi wisata	1	Sangat tidak mendukung
Kelembagaan	Organisasi pengelola	1.07	Sangat tidak mendukung
	Keramahan	3.29	Sangat mendukung

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai elemen penunjang potensi wisata di Desa Kuala Trang, temuan penelitian mengungkap dinamika yang kompleks antara kekuatan dan kelemahan destinasi. Pada aspek daya tarik wisata, lanskap fisik atau pemandangan alam mencapai skor 3,86 (kriteria sangat potensial), menjadi indikator terkuat yang mencerminkan keunggulan komparatif Desa Kuala Trang. Skor tinggi ini tidak terlepas dari kombinasi unik pantai berpasir putih, pepohonan pinus, dan kolam alam yang menciptakan visual lanskap yang menarik. Namun, perbedaan signifikan terlihat pada atraksi atau aktivitas fisik yang hanya memperoleh skor 1,86 (kurang potensial). Temuan ini mengonfirmasi bahwa destinasi ini masih bergantung pada daya tarik pasif (pemandangan) tanpa didukung aktivitas wisata yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan pengunjung.

Pada aspek aksesibilitas, kondisi jalan menuju lokasi meraih skor 3,21 (mudah dicapai), menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi sudah memadai meskipun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan jalan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, aksesibilitas yang baik tidak diimbangi dengan ketersediaan amenities penunjang. Ketersediaan rumah makan memperoleh skor terendah (1,16; sangat tidak terpenuhi), diikuti tempat parkir (2,26; kurang terpenuhi). Kondisi ini mengindikasikan adanya celah antara mobilitas pengunjung dan kenyamanan mereka selama berkunjung. Rendahnya skor amenities juga mencerminkan lemahnya partisipasi ekonomi masyarakat dalam menyediakan jasa wisata, yang sebenarnya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.

Aspek promosi dan informasi menunjukkan kondisi paling kritis dengan skor 1 untuk kedua indikator (media promosi dan pusat informasi). Hal ini menegaskan bahwa destinasi ini

bergantung pada promosi dari mulut ke mulut dan belum memanfaatkan potensi digital marketing. Ketiadaan pusat informasi juga memperpanjang proses adaptasi wisatawan terhadap destinasi. Temuan ini selaras dengan kondisi kelembagaan yang memperoleh skor 1,07 (sangat tidak mendukung), menunjukkan bahwa pengelolaan wisata masih dilakukan secara mandiri tanpa struktur organisasi yang jelas. Lemahnya kapasitas kelembagaan ini berbanding terbalik dengan tingginya skor keramahan masyarakat (3,29; sangat mendukung), yang seharusnya dapat menjadi modal sosial untuk mengembangkan sistem pengelolaan kolaboratif.

Lemahnya kapasitas kelembagaan yang berbanding terbalik dengan tingginya skor keramahan masyarakat mengindikasikan bahwa modal sosial relational (kepercayaan dan keramahan antarindividu) di Desa Kuala Trang sangat kuat. Namun, modal sosial ini belum berhasil ditransformasikan menjadi modal sosial institutional berupa kelembagaan yang efektif. Nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong yang mungkin masih hidup dalam skala kecil (seperti RT/RW) belum terlembagakan dalam sebuah organisasi pengelola wisata yang formal dan berkapasitas. Hal ini memunculkan tantangan untuk mengubah budaya keramahan yang bersifat personal menjadi sistem pelayanan yang profesional.

4.4. Model Pemberdayaan untuk Desa Wisata Kuala Trang

Berdasar penggalan potensi dan minat partisipasi masyarakat, serta persepsi wisatawan, peran pemerintah menjadi fondasi kritis yang menjawab temuan lemahnya aspek kelembagaan (skor 1.07). Tahap ini melibatkan pembentukan lembaga pengelola yang representatif, terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh adat, pemuda, ataupun kelompok perempuan. Lembaga ini nantinya akan berfungsi sebagai penggerak yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas wisata, mengelola dana, dan memastikan transparansi. Pembentukan kelembagaan yang kuat dan akuntabel merupakan prasyarat untuk mengkonsolidasikan semua potensi dan kegiatan masyarakat yang secara kuesioner menunjukkan dukungan sangat tinggi (86% setuju pengembangan wisata).

Pengembangan kapasitas lokal perlu dirancang untuk membangun kompetensi masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan telah terbukti dapat meningkatkan semangat dan motivasi masyarakat sehingga lebih berdaya dan mandiri (Istiyanti, 2020). Pengembangan kapasitas lokal perlu dilakukan melalui pendampingan pemuda sebagai pemandu wisata dengan memanfaatkan lanskap hutan pinus dan pantai yang sangat potensial (skor 3.86); pendampingan pengelolaan lokasi wisata; dan pendampingan pengolahan produk lokal seperti singkong dan kelapa menjadi oleh-oleh khas (misalnya keripik singkong dan *u neulheu*), yang selama ini masih memiliki nilai ekonomi minimal. Pelatihan ini secara langsung menjawab keinginan responden untuk terlibat aktif dan keyakinan responden bahwa wisata dapat meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan analisis persepsi wisatawan yang menunjukkan ketertarikan pada pantai dan kolam (100% responden menyatakan menarik) namun minimnya atraksi aktif (skor 1.86), maka dapat dikembangkan paket wisata. Pengembangan paket wisata perlu memerlukan kesiapan dari masyarakat (Junizar, et al., 2023). Paket wisata dapat mengintegrasikan beberapa aktivitas seperti memancing, menanam mangrove (edukasi konservasi), workshop memasak kuliner tradisional, serta melihat langsung tradisi petani dan nelayan. Paket ini tidak hanya menawarkan pemandangan tetapi pengalaman yang dapat meningkatkan nilai kunjungan wisatawan.

Pemasaran digital dan adanya jejaring kemitraan diperlukan secara spesifik untuk mengatasi kelemahan fatal pada aspek promosi dan informasi (skor 1). Strateginya yang dapat dilakukan meliputi pembuatan website dan peta digital yang memuat informasi lengkap, pemanfaatan media sosial (Instagram, TikTok) untuk mempromosikan keindahan alam dan paket wisata; serta membangun kemitraan dengan *influencer* lokal. Metode ini mentransformasikan keunggulan alam dan keramahan masyarakat (skor 3.29) menjadi produk yang dikenal luas.

Sebuah sistem pemantauan partisipatif perlu dibentuk untuk mengevaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan pariwisata. Yang terpenting, mekanisme pembagian manfaat yang transparan dan adil dirumuskan bersama. Misalnya, sebagian pendapatan dari paket wisata dialokasikan untuk dana konservasi dan dana sosial desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, sehingga dukungan 90% responden untuk keberlanjutan program dapat dipertahankan. Hasil dari evaluasi dan umpan balik dari masyarakat maupun wisatawan akan digunakan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan kelembagaan, kapasitas, dan paket wisata yang ditawarkan. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional bagi pemerintah desa dan masyarakat Kuala Trang dalam membangun pariwisata yang memberdayakan, menguntungkan, dan menjaga kelestarian aset alam serta budaya mereka yang berharga. Pengembangan paket wisata harus sensitif terhadap nilai dan norma setempat. Misalnya, aktivitas 'melihat tradisi petani/nelayan' harus dirancang agar tidak mengganggu ritme atau privasi komunitas, sehingga tidak menimbulkan alienasi sosial. Sebaliknya, hal ini justru dapat memperkuat kebanggaan dan identitas kultural masyarakat.

4.5. Implikasi Strategis bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Keberhasilan pengembangan Desa Wisata Kuala Trang tidak dapat hanya bertumpu pada inisiatif masyarakat, tetapi memerlukan dukungan struktural dan kebijakan yang konkret dari berbagai level pemerintahan serta pihak terkait. Pemerintah desa memegang peran kunci sebagai fasilitator dan katalisator yang paling dekat dengan masyarakat. Studi terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Nurohman et al., 2019). Implikasi strategisnya adalah perlunya komitmen politik dan alokasi sumber daya yang jelas untuk mendorong agenda pariwisata. Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran yang spesifik untuk pengembangan wisata, terutama untuk pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat (seperti pelatihan pemandu wisata, homestay, dan pengolahan produk lokal) serta perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung dasar, seperti tempat sampah, penunjuk arah, dan toilet umum yang bersih. Pemerintah desa juga perlu menerbitkan peraturan yang mengatur tata kelola desa wisata, termasuk pembagian peran, hak, dan kewajiban serta mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan. Peraturan ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak. Dan penting pula bagi pemerintah desa untuk memfasilitasi proses musyawarah perencanaan pembangunan desa yang inklusif untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat terkait pengembangan wisata terdengar dan terakomodasi dalam perencanaan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga perlu bertindak sebagai regulator dan promotor yang dapat membuka akses yang lebih luas bagi Desa Kuala Trang. Hal ini dapat dimulai dengan memasukkan Desa Kuala Trang secara resmi ke dalam peta dan kalender destinasi wisata Kabupaten Nagan Raya. Ini termasuk mempromosikannya dalam materi promosi, website resmi,

dan kegiatan pariwisata kabupaten. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga dapat memberi dukungan dengan cara menyederhanakan proses perizinan untuk usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata untuk mendorong partisipasi ekonomi masyarakat; mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur penunjang yang lebih besar, seperti perbaikan akses jalan menuju destinasi utama (jika diperlukan) atau pembangunan pusat informasi wisata sederhana; maupun memberikan pendampingan teknis melalui Dinas Pariwisata atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk membantu penyusunan rencana jangka panjang desa wisata dan penguatan kelembagaan.

Sementara itu, masyarakat adalah pelaku utama yang harus bergerak secara kolektif dan terorganisir, terutama untuk pengembangan paket wisata (Nainggolan dan Rahayu, 2023). Badan pengelola seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sah, representatif, dan akuntabel harus melibatkan perwakilan dari semua elemen masyarakat (pemuda, perempuan, tokoh adat, pelaku UMKM) dan ditetapkan melalui musyawarah desa. Badan pengelola ini harus menyusun AD/ART dan rencana kerja tahunan yang jelas, serta membuka sistem keuangan yang transparan kepada seluruh masyarakat untuk membangun kepercayaan. Badan pengelola dapat menginisiasi program percontohan secara mandiri, seperti kerja bakti rutin membersihkan destinasi wisata, atau mengadakan festival kuliner kecil untuk mempromosikan produk lokal, sebagai bentuk komitmen dan kesiapan untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, pengembangan wisata yang didasari oleh masyarakat lokal merupakan upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat (Saepuddin, 2022).

Akademisi atau universitas dapat berperan sebagai fasilitator eksternal yang menyediakan pendampingan teknis, asistensi dalam penyusunan proposal pendanaan, dan memantau aspek keberlanjutan ekologis dalam pengembangan wisata. Dengan menjalankan rekomendasi yang terukur dan dapat ditindaklanjuti ini, seluruh pemangku kepentingan dapat mentransformasikan potensi besar Desa Kuala Trang menjadi kenyataan yang membawa kesejahteraan ekonomi, mempertahankan kelestarian lingkungan, dan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat.

5. PENUTUP

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa Desa Kuala Trang memiliki dasar alam yang kuat untuk pengembangan wisata, namun menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan, fasilitas, dan promosi. Pendekatan pengembangan yang holistik diperlukan dengan memprioritaskan penciptaan aktivitas wisata berbasis alam dan budaya; peningkatan amenitas melalui pemberdayaan masyarakat; digitalisasi promosi; dan penguatan kelembagaan melalui pelatihan dan dukungan regulasi. Dari perspektif sosiologis, pengembangan Desa Wisata Kuala Trang pada dasarnya adalah proses rekayasa sosial yang kompleks. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi lebih pada kemampuan untuk memberdayakan modal sosial yang ada, mengelola dinamika kekuasaan, dan memastikan inklusi sosial bagi seluruh elemen masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya (2024) *Kecamatan Kuala Pesisir dalam Angka 2024*, Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.

-
- Budilaksono, S. and et al (2024) ‘Tantangan dan Peluang Desa Wisata Menuju Desa Wisata Mandiri’, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, pp. 123–134.
- Higgins-Desbiolles, F. (2018) ‘Sustainable Tourism: Sustaining Tourism or Something More?’, *Tourism Management Perspectives*, 25, pp. 157–160.
- Istiyanti, D. (2020) ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening’, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), pp. 53–60.
- Junizar, F., Khadijah, U.L. and Rizal, E. (2023) ‘Perencanaan Paket Wisata pada Desa Wisata Kadingeh Kec. Baraka Kab. Enrekang’, *KABILAH: Journal of Social Community*, 7(2), pp. 221–233.
- Nainggolan, H.C. and Rahayu, A. (2023) ‘Pengemasan Paket Wisata di Desa Wisata Kampoeng Lama Kabupaten Deli Serdang’, *Manajemen Dan Pariwisata*, 11(3), p. 104.
- Sudibya, B. (2018) ‘Wisata Desa dan Desa Wisata’, *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), pp. 22–26.
- Syah, F. (2017) ‘Strategi Mengembangkan Desa Wisata’, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, pp. 345–355.
- Tyas, N.W. and Damayanti, M. (2018) ‘Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen’, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), pp. 74–89.
- Zielinski, S., Jeong, Y. and Milanés, C.B. (2021) ‘Factors That Influence Community-Based Tourism (CBT) in Developing and Developed Countries’, *Tourism Geographies*, 23(5), pp. 1040–1072.